

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

YEREMIA MONINTJA
JOYCE RARES
JOOIE RURU

Abstrak: Indonesia is a country that has very many tourist objects to go. With that, Indonesia has the capital to attract foreign tourist to visit Indonesia. The presence off oreign tourists does have a good influence on Indonesia, especially in economic sector. To support this, the Presidential Regulation No. 21 of 2016 concerning visa-free visits was made. Policies taken by the government to make it easier for foreign countries to visit Indonesia. Including the province of North Sulawesi, which is now the focus of research. By using qualitative methods, so as to obtain data through direct observation and in-depth interviews with several informants. The results of this study indicatethat, in terms of communication has been going well. Then in terms of resources it is good, butt here must be additional staff becauseof a short age of workers. Then from the disposition or attitude of the employee, it has gone very well. From the bureaucratic structure it has also been arranged very well. However, in this policy, there are still problems, which is theuse of visa-free visits for those who have not fully understood this policy. Then, there are too many countries granted visa exemptions to Indonesia, whichis 169 countries.

Keywords: implementation, visit visa-free policy.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari 25 negara yang memiliki luas wilayah terbesar yang ada di dunia, dengan memiliki luas wilayah sekitar 1.904. 569 km persegi. Dan tentunya Indonesia juga mempunyai jumlah masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya, Indonesia sampai pada saat ini menduduki peringkat ke-4 untuk jumlah penduduk terbanyak di dunia yaitu sekitar 3,42% dari total jumlah penduduk dunia. Dengan luas wilayah Indonesia yang sangat luas tentunya Indonesia banyak sekali kekayaan alam yang ada di didalamnya salah satunya adalah Indonesia memiliki sangat banyak wilayah kepulauan yaitu sekitar 14.572 pulau yang baru-baru ini di verifikasi di dalam sidang *Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)*. Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pariwisata di Indonesia salah satunya dengan membuat kebijakan Bebas Visa Kunjungan

pada tanggal 10 Juni tahun 2015 lewat Perpres Nomor 69 Thn 2015 untuk 45 Negara. Dan pada 18 September 2015 menambah 45 negara lagi lewat Perpres Nomor 104 Thn 2015 menjadi 90 negara dan pada tahun 2016 pemerintah kembali menambah negara yang mendapat visa bebas kunjungan dengan Perpres Nomor 21 Thn 2016 menjadi 169 Negara. Kantor wilayah imigrasi Sulawesi utara selaku implementor kebijakan ini yang bertempat di bandara Sulawesi utara mendapati kendala yakni di dalam kebijakan visa bebas kunjungan ini hanya di beri batas waktu yaitu 30 hari sejak kedatangan, berbeda dengan visa on arrival yang bisa di perpanjang, visa bebas kunjungan ini sama sekali tidak bisa di perpanjang. Dan disaat ketika banyak turis yang masa berlaku visa nya habis membuat Kantor wilayah Imigrasi Sulawesi utara bekerja ekstra dikarenakan setiap turis yang visa nya sudah lewat batas waktu tidak

diperbolehkan untuk melakukan aktivitas lain dan ini membuat kantor wilayah imigrasi provinsi Sulawesi utara harus bekerja lebih ekstra dikarenakan setiap turis yang sudah lewat batas kunjungannya akan ditampung di kantor imigrasi dan setelah itu akan ditempatkan di rumah detensi imigrasi Sulawesi utara. Lewat masalah ini seharusnya sudah terlebih dahulu di tekankan pada saat turis mancanegara datang untuk batas waktu kunjungan mereka. Kemudian yang menjadi masalah yakni sumber daya implementor yang kurang sehingga membuat para pegawai harus bekerja ekstra untuk kebijakan ini.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama dengan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari seluruh proses kebijakan, tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Menurut Purwanto dan Sulistyatuti (2012:21) Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Patton dan Sawicky dalam Tangkilisan (2003:9) Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seseorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Bebas Visa Kunjungan

Pada 2 Maret 2016 yang lalu Indonesia resmi membuat kebijakan visa bebas kunjungan untuk 169 negara lewat Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang di tandatangani oleh Presiden Joko Widodo, Sebelumnya hanya ada 45 negara yang mendapat hak untuk menggunakan visa bebas kunjungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 dan di tahun yang sama kembali lewat Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 menambah jumlah negara yang mendapat hak menggunakan visa bebas kunjungan menjadi 90 negara. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Penerima Bebas Visa Kunjungan pun dapat keluar dan masuk

melalui 124 Tempat Pemeriksaan Imigrasi darat, laut dan udara.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif-kualitatif, yaitu suatu penelitian yang di tujukan atau dimaksudkan untuk mengamati dan menganalisis secara cermat dan menggambarkan suatu fenomena tertentu (Singarimbun dan Effendy, 1992; Arikunto, 2000). Dalam penelitian deskriptif-kualitatif, peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2013:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Menurut Moelong (2007), focus penelitian di maksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak dimasukan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, walaupun data itu menarik.

Jenis Pengumpulan Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diambil melalui tahap wawancara (interview). Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan.

Informan

1. Kepala Kantor Imigrasi
: 1 Orang
2. Pegawai Imigrasi
: 4 Orang
3. Turis Pengguna Visa Bebas Kunjungan
: 2 Orang

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan Bebas Visa Kunjungan, komunikasi merupakan hal yang penting. Dan dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan di kantor imigrasi kelas I Manado sudah berjalan dengan baik untuk pengarahannya dan pembagian tugasnya karena dilihat dari pelaksanaan kebijakan ini yang sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh implementor sendiri. Contoh dalam hal apa harus diperiksa saat melakukan pemeriksaan itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik, Kemudian pemahaman para pegawai mengenai kebijakan ini yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 sudah baik. Artinya bahwa komunikasi dari pimpinan, staff bahkan antara seksi-seksi yang ada ini sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan juga dari koordinasi seksi pemeriksaan imigrasi dan seksi intelejen & penindakan keimigrasian yang melakukan komunikasi saat ada orang yang dicurigai masuk ke kawasan Indonesia. Pada saat dilakukan pemeriksaan kemudian orang yang diperiksa dicurigai maka seksi pemeriksaan imigrasi akan melakukan koordinasi dengan seksi intelejen & penindakan keimigrasian untuk melihat kegiatan dari orang tersebut.

Sumber Daya

Dalam melaksanakan setiap program implementor harus memiliki sumber daya manusia yang baik agar supaya setiap program yang ditetapkan akan terlaksana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Manusia sebagai penggerak atau motor dari sebuah kebijakan yang mengakibatkan apabila tidak ada sumber daya manusia maka kebijakan tidak akan berjalan.

Menanggapi hal tersebut Agustini Leo (2006:142) Menjelaskan bahwa sumber daya manusia juga berkaitan dengan kapasitas dan integritas yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut selaku pelaksana kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Dan untuk sumber daya yang ada di kantor imigrasi sendiri sudah baik dalam melaksanakan kebijakan ini dalam hal pemeriksaan visa mereka sudah sangat mengerti tentang kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini hanya mungkin memiliki kendala sedikit dibahasa tetapi kata seorang informan untuk masalah tersebut masih bisa diatasi. Kendala yang terjadi sendiri yaitu hanyalah kekurangan sumber daya dimana satu pegawai harus bekerja ekstra untuk melakukan pemeriksaan visa dimana satu pegawai harus berkali-kali kembali ke tempat pemeriksaan imigrasi karena harus melaksanakan pemeriksaan akan lebih ideal lagi kalau untuk pemeriksaan ini dilakukan secara bergantian.

Disposisi atau sikap

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dilihat dari faktor disposisi maka dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakan bebas visa kunjungan ini sikap dari

implementor sudah baik dimana dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan sesuai prosedur dalam hal pengecekan. Pegawai imigrasi tetap berlaku sopan terhadap turis walaupun ada sedikit kesalahan pemahaman dengan turis asing mengenai aturan yang berlaku. Pegawai imigrasi tetap berlaku profesional jika ada orang yang datang tidak memenuhi syarat maka dia tidak diijinkan untuk masuk ke kawasan Sulawesi utara walaupun sudah ada upaya penyogokan dan lain-lain. Mereka juga berlaku tegas untuk turis yang melanggar aturan contohnya jika ada turis yang melewati batas kunjungan harus dilakukan penindakan entah itu denda, deportasi bahkan di pidana

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikantor imigrasi kelas I manado maka dapat dikatakan bahwa dari struktur birokrasi yang ada sudah berjalan ini dilihat dari pembagian-pembagian tugas yang telah dijabarkan dalam aturan. Struktur birokrasi yang ada dikantor imigrasi kelas I manado sudah berjalan dengan sangat baik dimana setiap seksi saling berkoordinasi dan saling melengkapi satu sama lain. Dimana seksi pemeriksaan keimigrasian untuk koordinasi berjalan dengan sangat baik dengan seksi penindakan keimigrasian begitu juga dengan seksi yang lain. Ini semua terjadi kemungkinan karena setiap hari dilaksanakan apel untuk membahas setiap tugas yang ada. Koordinasi sesama seksi juga berjalan dengan sangat baik.

Faktor struktur birokrasi sangat penting karena didalam melaksanakan implementasi kebijakan apabila pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi struktur birokrasi maka akan berjalan dengan baik.

Kesimpulan

1. Komunikasi kebijakan bebas visa kunjungan di kota manado secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Karena dilihat dari segi pelayanan yang dilakukan sudah mampu untuk

- berkomunikasi dengan turis-turis yang berkunjung ke daerah manado. Memang dari total 169 negara nyatanya sulit untuk bisa berkomunikasi menggunakan bahasa dari masing-masing negara yang berkunjung ke kota manado, rasanya memang tidak mungkin untuk pegawai sendiri untuk belajar bahasa dari 169 negara ini, mungkin bisa hanya untuk bahasa internasional yaitu bahasa inggris. Tapi sebenarnya dari pegawai yang bertugas sebagai pemeriksa visa ini sudah ada beberapa yang mengikuti les bahasa mandarin karena melihat juga mayoritas yang berkunjung ke daerah Sulawesi utara berasal dari negara china. Kemudian untuk komunikasi secara internal juga sudah berjalan dengan sangat baik dengan dilakukan apel setiap masuk dan jika jam pulang kantor.
2. Dilihat dari sumber daya yang ada di kantor imigrasi kelas I manado sudah baik dilihat dari skill bahkan pengetahuan tentang keimigrasian dari pegawai imigrasi yang ada, Pelayanan yang dijalankan juga sudah berjalan dengan baik, para pegawai sendiri sudah mengetahui apa tugas mereka dan mengerjakannya dengan baik. Mungkin hanya sedikit evaluasi untuk jumlah pegawai yang ada pemerintah harus menambah jumlah pegawai yang ada karena dinilai kuantitas pegawai yang ada kurang dan memaksa pegawai yang lain bekerja ekstra tanpa ada sistem shift yang diberlakukan. Secara keseluruhan penilaian untuk sumber daya yang ada di kantor imigrasi kelas I manado sudah baik.
 3. Disposisi atau sikap, kalau dilihat untuk sikap dari pegawai sendiri sudah sangat tegas karena dilihat dari hasil penelitian yang ada jika ada orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke daerah manado maka para pegawai tidak memakai istilah kekeluargaan didalamnya dan harus dikembalikan ke negara asal, informasi dari seorang

informan yang ada walaupun seringkali terjadi penyuaipan dari turis asing tetap dari pegawai imigrasi menjalankan tugasnya dengan professional dengan tidak mau menerima suap tersebut, ada juga yang ingin memberikan ucapan terima kasih lewat uang atas sikap ramah dari pegawai saat melakukan pemeriksaan tetapi tetap tidak mau menerima uang tersebut. Dan disini bisa dinilai untuk sikap dari pegawai sendiri sudah berjalan dengan sangatlah baik.

Saran

1. Sumber daya untuk kantor imigrasi kelas I manado sudah baik tapi perlu ditambah lagi untuk jumlah pegawai agar bisa dilakukan pergantian untuk penjagaan di tempat pemeriksaan imigrasi sendiri.
2. Jumlah negara yang ada dalam daftar negara yang berhak menggunakan bebas visa kunjungan dikurangi dengan melihat hasil evaluasi tiap-tiap negara yang berkunjung ke Indonesia apakah membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia atau tidak.
3. Komunikasi walaupun secara umum sudah terlihat maskimal tapi ada baiknya juga dari pemerintah yang terkait memberikan les bahasa inggris kepada semua pegawai imigrasi bukan hanya utusan 1-2 orang tetapi untuk semua pegawai yang bertugas sebagai pemeriksa visa agar negara yang berkunjung ke wilayah Indonesia juga bisa melihat sumber daya yang ada di Indonesia juga bukan main-main.

Daftar Pustaka

- Agustini, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: AlfaBeta
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Public* Yogyakarta: Gava Media

Friedrich, Carl J. 1963, *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill.

Harsono. Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik* Jakarta: Grafindo Jaya.

Korten, David C dan Syahrir. 1980. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Nurdin, Syaefudin dan Usman, Basyirudin, M. 2003. *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*. Jakarta : Ciputat Press.

Setiawan, Guntur, 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : Cipta Dunia

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Public dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfa Beta.

Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Public*. Bandung : AIPI

Tangkilisan, H.N 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Tangkilisan, Hessel, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta : Lukman Offset.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Center Of Academic Publishing Service (CAPS).

Sumber Lain :

UU No. 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian

PP No.32 tahun 1994 Tentang Visa

UU No.6 tahun 2009 Tentang Keimigrasian

Perpres No.21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan